

**EVALUASI SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENGELOLAAN DANA
APBDES DALAM MENINGKATKAN TRANSPARANSI DAN KINERJA
BADAN USAHA MILIK DESA**

**(Bumdes “Om Wifi” Desa Tanjung Kenongo Kecamatan Pacet
Kabupaten Mojokerto)**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Oleh :

Moch. Habib Listyo Hermawan

NPM. 21901082164



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JURUSAN AKUNTANSI**

2024

**EVALUASI SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENGELOLAAN DANA
APBDES DALAM MENINGKATKAN TRANSPARANSI DAN KINERJA
BADAN USAHA MILIK DESA**

**(Bumdes “Om Wifi” Desa Tanjung Kenongo Kecamatan Pacet
Kabupaten Mojokerto)**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Oleh :

Moch. Habib Listyo Hermawan

NPM. 21901082164



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JURUSAN AKUNTANSI**

2024

ABSTRAK

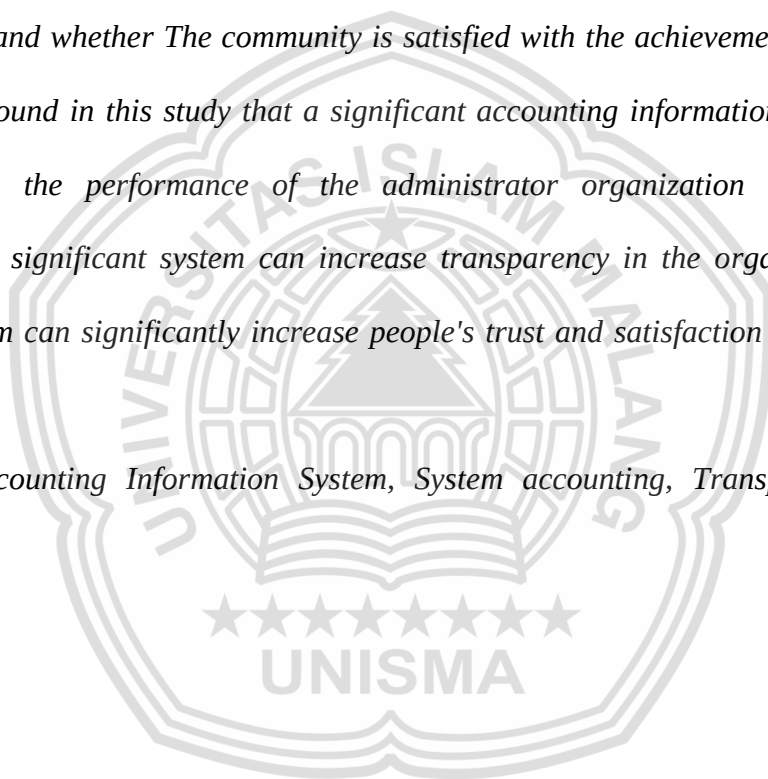
BUMDes merupakan kegiatan desa untuk meningkatkan perekonomian desa dan negara dan tidak lepas dari itu transparansi berperan penting dalam hal ini untuk mengembangkan dan membangun kepercayaan masyarakat, Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui apakah sistem informasi akuntansi akan meningkatkan transparansi dalam organisasi pemerintahan di Kantor Desa Tanjung Kenongo, 2) Untuk mengetahui apakah sistem informasi akuntansi dapat meningkatkan kinerja organisasi dan apakah masyarakat puas dengan pencapaian sistem tersebut, ditemukan dalam penelitian ini bahwa sistem informasi akuntansi yang signifikan sangat membantu kinerja organisasi administrator dan masyarakat, sistem yang signifikan dapat meningkatkan transparansi dalam Organisasi dan sistem dapat secara signifikan meningkatkan kepercayaan dan kepuasan orang dengan organisasi.

Kata Kunci: Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Akuntansi, Transparansi, BUMDes

ABSTRACT

BUMDes is a village activity to improve the village and state economy and cannot be separated from that transparency plays an important role in this case to develop and build public trust, The objectives of this study are: 1) To find out whether the accounting information system will increase transparency in the government organization at the Tanjung Kenongo Village Office, 2) To find out whether the accounting information system can improve organizational performance and whether The community is satisfied with the achievement of the system, it is found in this study that a significant accounting information system greatly helps the performance of the administrator organization and the community, a significant system can increase transparency in the organization and the system can significantly increase people's trust and satisfaction with the organization.

Keyword: *accounting Information System, System accounting, Transparency, BUMDes*



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era industri 4.0 yang hampir menuju 5.0 dengan segala perkembangannya presiden republik Indonesia bapak Joko Widodo mengatakan pada salah satu pembukaan bahwa “Pembangunan desa itu sangat penting, sejalan dengan program pemerintah yang membangun dari pinggiran” ujarinya pada Pembukaan Jambore Nasional Dai Desa Madani Parmusi 2023 di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Selasa, 26 September 2023. Sejalan dengan itu Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kepala BPIDDTT Kemendes PDTT), Ivanovich Agusta mengatakan bahwa “Sebetulnya ide dasar dari Menteri Desa PDTT yang berkaitan dengan *smart village* itu sangat sederhana, indikator utamanya yaitu ketika melakukan kegiatan itu berbasis data. Kemudian ketika melakukan layanan kepada masyarakat itu berbasis teknologi Informasi. Dua aspek itu sudah dimiliki seluruh desa saat ini, terutama yang sudah mengikuti proses pendataan SDGs Desa,” ujarinya pada *webinar professor talk*. pada Rabu (27/7/2022) dan tegaskan pula oleh beliau bahwa “SDGs Desa no 18 itu untuk budaya, institusi dan interaksi khas desa berjalan dan memayungi tujuan-tujuan pembangunan desa yang lain. Itu yang menjadi basis *smart village*, Desa Cerdas,” ujarinya, sedangkan menurut keterangan yang dipaparkan pada salah satu artikel mengenai 4 aspek utama yang wajib dipenuhi untuk menjadi desa sebagai *smart village* yakni “

Optimalisasi pelayanan publik: contohnya, desa yang cerdas mampu menyediakan sistem pelayanan dan sistem informasi yang baik dan mudah demi memenuhi setiap kebutuhan warga” (<https://binus.ac.id/2023/06/menuju-smart-village>, 2023).

Maka sistem menjadi poin penting bisa kita simpulkan bahwa sistem informasi yang bagus adalah syarat untuk mengembangkan desa menuju ke level selanjutnya, dan juga faktor penting pengembangan desa juga salah satunya melalui badan usaha milik desanya, pada suatu siaran pers Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) Taufik Madjid menegaskan bahwa “Kami berharap dapat dikelola dengan baik oleh BUMDes sebagai instrumen yang penting dalam hal ini” ujarnya. Didukung pula oleh pernyataan Presiden RI Joko Widodo pada laman resmi Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia “Semuanya harus berani mengubah, transformasi ekonomi di desa ini sangat penting sekali. Dan BUMDesa, BUMDesa Bersama juga harus bertransformasi, tidak rutinitas, tidak menggarap hal-hal yang hanya untuk desa, tapi juga punya visi besar, bisa lari ke pasar-pasar yang lebih besar, apalagi ke pasar-pasar ekspor,” ujar pak Jokowi, pada permendes PDTT nomor 16 tahun 2018 pada poin I prioritas penggunaan dana desa dijelaskan bahwa “Keberdikarian Desa dibidang ekonomi akan mempercepat penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa. Salah satu langkah strategis untuk menjadikan Desa berdikari di bidang ekonomi adalah membentuk, mengelola dan mengembangkan Badan Usaha Miliki Desa (BUMDesa) dan/atau BUMDesa Bersama”, (Permendes-PDPT

Nomor 16 Tahun 2018), serta diperkuat pula oleh pada PP No 11 Tahun 2021 tentang BUMDesa pada pasal 3 poin dijelaskan bahwa tujuan dibentuknya BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama pada poin C ialah untuk “memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli desa serta mengembangkan sebesar – besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa” dan pada poin E ialah “ mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa” maka dapat kita simpulkan bahwa salah satu penambah ekonomi dan pengurangan kemiskinan terbesar desa yakni Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Badan usaha milik desa atau yang biasa kita kenal dengan sebutan BUMDes adalah suatu kegiatan atau usaha yang tujuan utamanya adalah untuk memajukan ekonomi negara, melalui badan usaha milik desa ini Desa dapat meningkatkan ekonomi dan juga dapat menyediakan lapangan pekerjaan bagi warga desa itu sendiri, sehingga Desa dapat pula ikut membantu pemerintah pusat menekan angka pengangguran dan kemiskinan di Indonesia, namun pada kenyataannya pengelolaan BUMDes ini sendiri memiliki beragam kendala, dari banyaknya BUMDes yang masih kurang efektif dikutip dari kompas.com, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa pada tahun 2019, sebanyak 2.188 BUMDesa tidak beroperasi bahkan bisa disebut mati suri dan sebanyak 1.670 BUMDesa beroperasi namun belum berkontribusi terhadap pendapatan Desa, dan juga menurut data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) per juni 2021, saat ini Indonesia memiliki 83.381 Desa namun menurut data Kementerian Desa PDTT (bumdes.kemendes.go.id per maret 2023) hanya terdapat 12.945 Badan

usaha milik desa (BUMDes) yang resmi berbadan hukum, dan kurang lebih ada sekitar 35.000 bumdes yang masih dalam tahap registrasi, dengan demikian masih ada sekitar 42 persen Desa di Indonesia yang belum memiliki BUMDes di daerahnya.

Pada dasarnya kegiatan Desa seperti bumdes ini dapat dilakukan dengan sangat lancar apabila sistem dan kontrol didalamnya dilakukan secara efektif dan efisien sehingga dapat menghindari berbagai kesalahan dan pelanggaran yang berpeluang terjadi karena Menurut definisi dari (Mulyadi dalam Sistem Akuntansi (2008:3)) Sistem informasi akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen, guna memudahkan pengelolaan Sistem yang dilakukan secara efektif dan efisien dapat membantu Desa mencapai tujuan yang diinginkan, maka dengan sistem informasi yang jelas dan benar pula Desa dapat menanggulangi dan mencegah segala bentuk kesalahan dan kecurangan dari internal maupun eksternal, hal itu mungkin terjadi apabila sistem informasi secara terang-terangan dan transparan menyampaikan segala informasi yang bisa dilihat oleh pegawai Desa maupun warga Desa agar seluruh warga Desa dapat berkontribusi menjadi pengawas tambahan membantu pemerintah.

Seperti yang kita ketahui bawasanya lagi marak terjadi kecurangan dan penyelewengan dana Desa dikarenakan ketidakpahaman pegawai Desa terhadap aliran dana dan aset Desa serta tujuan dan program apa yang akan dilaksanakan dengan aset dan dana tersebut, seperti kasus yang pernah terjadi di Mojokerto dilansir dari metrotvnews.com seorang kepala desa berhasil

menggelapkan dana Desa sebesar 217 juta guna kepentingan pribadinya (metrotvnews.com, 2023). dan ada pula kepala desa yang berhasil menggelapkan aset Desa secara pribadi tanpa bantuan siapapun dilansir dari factualnews.co bahwa mantan kepala desa di Mojokerto bernama Trisno H(37) ini menyebabkan kerugian bagi Desa sebesar 797.774.000 juta berdasarkan audit dari inspektorat kabupaten Mojokerto didukung dengan kesaksian kepala seksi pidana khusus kejar Kab Mojokerto bahwasanya sang kepala desa melakukan semua ini sendiri tidak melibatkan perangkat Desa lainnya (faktualnews.co, 2022). Maka sebenarnya sistem yang transparan dan jelas akan dapat membantu aparat desa melihat dan meneliti setiap program dan situasi dana Desa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 disebutkan bahwa sumber dana Desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dialokasikan secara adil berdasarkan alokasi dasar, dan alokasi yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten/Kota, serta berdasarkan Undang – Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan pula bahwa Desa punya sumber pendapatan asli Desa. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota. Diperkuat pula oleh Indrawati (2017), menyatakan bahwa dana Desa bersumber dari belanja pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan dana Desa. Maka segala program desa seharusnya sudah dibantu oleh pusat berdasarkan laporan dan kondisi desa untuk mendukung program pembangunan Desa, badan usaha milik desa (BUMDES), dan pemberdayaan masyarakat guna memajukan Desa. Selain

itu untuk menciptakan tata kelola keuangan yang akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab, maka dari itu diciptakan pula, Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dengan mempertimbangkan pula ketentuan pasal 106 Peraturan Pemerintah (PP) 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan untuk Undang – Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014.

Sebagaimana tertera pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 29 yakni “Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa”. Dilanjutkan dalam angka 6 dijelaskan pula Bahwa “Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat” laporan yang dimaksud ialah laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan.

Kepala Desa menyampaikan Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati atau Walikota melalui Camat disetiap akhir tahunnya, laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksudkan pada pasal (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan Desa. Selanjutnya Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, dan bantuan keuangan kepada Desa.

Dilihat dari proses dan alur dana Desa serta perancangan – perancangan yang dilakukan Desa di atas bisa dilihat bahwasanya pemerintah sudah mendukung setiap Desa agar setiap daerah dapat mengembangkan segala aspek infrastruktur, kesejahteraan rakyat, dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) maka seharusnya setiap Desa memiliki potensi berkembang secara signifikan namun pada implementasi menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2019 setidaknya masih ada 35,15% Desa di Indonesia yang belum memiliki setidaknya 1 (Satu) BUMDes di Desanya, dengan angka yang lumayan tinggi itu masih banyak pula BUMDes yang tidak beroperasi seperti yang dilansir dari (tirto.id, 2019) menjelaskan bahwa meskipun pemerintah sudah menyalurkan dana nyaris 330 triliun guna program – program Desa dalam lima tahun terakhir masih belum dimanfaatkan secara optimal oleh Desa terutama BUMDes, Presiden Jokowi menambahkan pula pada Rabu (11/12/2019) bahwa ada setidaknya 2.188 BUMDes terbengkalai alias tidak beroperasi dan juga pak Jokowi menambahkan pula bahwa masih ada setidaknya 1.670 BUMDes yang beroperasi tapi optimal dalam berkontribusi menggerakkan ekonomi negara.

Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menyebut bahwa banyak BUMDes yang tidak menyampaikan laporan, belum tertib dalam tata usaha, dan tidak diolah oleh orang – orang yang kompeten, dan BPK menambahkan pula bahwa ditemukan juga banyak sekali penyalahgunaan dana BUMDes, Maka pada dasarnya banyak BUMDes yang tidak beroperasi atau beroperasi namun tidak optimal dikarenakan kurangnya rencana usaha, Sumber daya manusia yang tidak ahli dan juga tidak efektifnya laporan, serta pengelolaan

dana pada BUMDes itu sendiri sehingga terjadi kecurangan pada dana BUMDes atau bahkan dana Desa.

Penggunaan alokasi dana Desa masih sering terjadi kecurangan didalamnya oleh oknum – oknum yang tidak bertanggung jawab yang sudah dipercaya oleh masyarakat untuk membangun Desa agar lebih maju dan berkembang, maka sudah seharusnya sistem informasi akuntansi Desa harus dikembangkan sehingga data dan situasi Desa dapat dilihat dan ditelaah oleh masyarakat dan juga Desa harus mengembangkan rencana dan alur keuangan Desa agar efisien dan efektif sehingga perangkat Desa dapat pula meminimalisir kecurangan yang dapat dilakukan oleh oknum – oknum yang tidak bertanggung jawab, di sinilah sinergi antara aparat Desa dan masyarakat diuji dan di sinilah peran penting masyarakat sebagai pengawas langsung jalannya agar program – program Desa berjalan semestinya kearah pembangunan yang lebih maju lagi, hal ini dilakukan karena sebesar 70% dana Desa diperuntukkan untuk kepentingan dan pemberdayaan Desa serta 30% untuk penyelenggaraan pemerintahan Desa. Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat Desa diarahkan ke sektor perbaikan atau pembangunan sarana dan prasarana fisik Desa yang meliputi perbaikan sarana publik dalam skala kecil dan perbaikan lingkungan serta pemukiman, honor tim pelaksana Alokasi Dana Desa (ADD) dan penguatan kelembagaan Desa dan kegiatan Desa lainnya yang dianggap penting untuk kemajuan Desa. Sedangkan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk penyelenggaraan pemerintah desa diarahkan untuk menunjang

penyelenggaraan pemerintah desa dan operasional Badan Permusyawaratan Desa (Arista, 2017).

Di sisi lain, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014, dana dialokasikan kepada pemerintah desa untuk membiayai penyelenggaraan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014, cukup jelas bahwa alokasi untuk setiap desa sangat besar, yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa, jumlah wilayah desa, tingkat kemiskinan masyarakat desa dan tingkat kemiskinan desa. kesulitan geografis Dana ini cukup besar digunakan oleh pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa.

Pada penelitian sebelumnya telah banyak meneliti tentang faktor-faktor sistem informasi akuntansi pada desa, pengendalian internal, efektifitas arus keuangan desa, pemanfaatan teknologi dalam pengolahan dana desa, pengaruh transparansi akuntabilitas, pengaruh kompetensi, dan lainnya, diperoleh pembuktian hasil yang beragam, guna melihat, memastikan dan menganalisis hal – hal di atas berjalan seperti apa di desa tempat penelitian dan tujuan penelitian ini juga memberikan bukti teoritis seberapa penting sistem informasi akuntansi yang efektif dan efisien bagi arus keuangan desa dan pembangunan desa serta penelitian ini juga bermanfaat untuk berbagai macam kalangan seperti perangkat desa, calon perangkat desa, desa merintis, dan masyarakat oleh sebab itu penelitian dengan judul “Evaluasi sistem informasi akuntansi pengelolaan dana APBDes dalam meningkatkan transparansi dan kinerja badan usaha milik desa” ini perlu dilakukan.

1.2 Rumusan Masalah

Disesuaikan dengan latar belakang di atas, perumusan masalah penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi pada Desa Tanjung Kenongo Kabupaten Mojokerto?
2. Bagaimana sistem informasi akuntansi keuangan desa dalam mengembangkan Transparansi pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Tanjung Kenongo Kabupaten Mojokerto?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan Masalah di atas, maka tujuan penelitian ini ialah seperti di bawah:

1. Untuk menganalisis efektivitas sistem informasi akuntansi pada Desa Tanjung Kenongo Kabupaten Mojokerto.
2. Untuk menganalisis sistem informasi akuntansi keuangan desa dalam mengembangkan Transparansi pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Tanjung Kenongo Kabupaten Mojokerto.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Aspek Teoritis :

Manfaat secara teoritis ialah manfaat yang didasarkan untuk ilmu pengetahuan. Ada beberapa manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian ini, antara lain:

- A. Bagi bidang keilmuan diharapkan dapat memperluas khasanah ilmu pengetahuan melalui penelitian ini khususnya berkaitan dengan akuntansi sektor publik, sistem informasi akuntansi dan *teori stewardship* Devis & Donaldson.
- B. Bagi peneliti selanjutnya, diharap dapat menjadi referensi dan pengembang pada penelitian selanjutnya terkait dengan akuntansi sektor publik, evaluasi sistem informasi akuntansi ataupun teori yang sama.

2. Aspek Praktis

Manfaat praktis yakni manfaat yang dapat dirasakan dan digunakan oleh perangkat desa, masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan, manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini yakni:

1. Bagi perangkat desa Tanjung Kenongo, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi dengan mendeskripsikan dasar – dasar dari sistem informasi akuntansi yang efektif sehingga dapat melihat dan mengevaluasi kesalahan – kesalahan pada sistem informasi akuntansi desa.
2. Bagi masyarakat dan pihak lain, diharap dapat menjadi gambaran bagaimana usaha desa untuk meningkatkan kinerja desa sehingga desa lebih optimal dalam meningkatkan perekonomian desa.

3. Bagi Kementerian desa PDTT. Diharap dapat menjadi saran dan pertimbangan untuk perkembangan regulasi pengelolaan keuangan desa.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan, Keterbatasan dan Saran

5.1.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis apakah sistem informasi akuntansi sudah efektif dan sesuai pedoman menurut para ahli, serta mengetahui apakah sistem informasi akuntansi desa dapat menunjang transparansi pada kegiatan pengelolaan dana di desa Tanjung Kenonggo. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan hasil akhir dapat ditarik kesimpulan sebagaimana ditemukan yakni:

1. Sistem informasi akuntansi desa Tanjung Kenonggo sudah cukup efektif dalam penggunaannya, dikarenakan sudah memenuhi target yang ditetapkan oleh desa dan sudah memenuhi indikator – indikator yang dikemukakan oleh Makmur (2015) yakni ketepatan waktu, ketepatan perhitungan biaya, ketepatan dalam pengukuran, ketepatan dalam penentuan pilihan, ketepatan berpikir, ketepatan dalam melakukan perintah, ketepatan dalam menentukan tujuan, dan ketepatan sasaran. Semua indikator yang dibutuhkan oleh sistem informasi akuntansi untuk bisa dikatakan efektif dalam penggunaan sudah dengan bagus dicapai oleh sistem dan segala unsurnya.
2. Transparansi pada desa Tanjung Kenonggo sudah cukup sesuai dengan beberapa ketentuan yang dijabarkan oleh Mulyaningsih (2019:7) yang peneliti kutip dari purnawati (2021) menjabarkan

bahwa indikator dari tercapainya transparansi adalah ketersediaan aksesibilitas dokumen, kejelasan dan kelengkapan informasi, keterbukaan proses dan kerangka regulasi yang menjamin transparansi. Berdasarkan indikator di atas dan hasil penelitian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa semua indikator sudah berjalan sesuai dan selaras dengan peraturan – peraturan desa.

3. Sistem sudah menunjang dengan signifikan dilihat dalam pengukuran indikator – indikator transparansi, sistem selalu menjadi poin yang tidak pernah terlewatkan mulai dari perwakilan warga atau bahkan perangkat desa serta terbukti pula bahwa laman resmi desa menjadi poin yang tidak pernah tertinggal selama wawancara Bersama kepala desa, sekretaris atau pun warga, dengan tidak langsung warga sudah bisa dibilang sangat terbantu terhadap akses data melalui laman resmi desa tersebut.
4. Mekanisme Bumdes sudah menunjukkan adanya perkembangan yang signifikan, biaya, pelayanan dan kualitas wifi menjadi nilai penting kepuasan masyarakat yang sudah berhasil dibawa oleh desa namun tentu masih ada yang perlu dikembangkan seperti mekanisme pembayaran yang bisa dikembangkan.

5.1.2 Keterbatasan

Adapun keterbatasan pada penelitian yang ditemukan oleh peneliti yakni:

1. Subjek penelitian atau bisa disebut informan masih terbilang terbatas yakni hanya mencakup kepala desa, sekretaris desa, kasi

pemerintahan, perwakilan warga aktif, sehingga peneliti tidak mendapatkan banyak sisi pandang.

2. Keterbatasan ruang lingkup yang terbatas hanya pada satu desa, yang bisa dikatakan kurang luas dan tidak ada pembandingan pada proses desa dengan lainnya.

5.1.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian telah dijabarkan, peneliti menyampaikan beberapa saran yakni:

1. Bagi peneliti selanjutnya dapat memperluas jangkauan informan yang akan diwawancarai, dengan seperti itu peneliti akan menerima berbagai macam sudut pandang yang berbeda sehingga penelitian akan lebih mendapat tolak ukur yang beragam
2. Bagi peneliti selanjutnya bila mendapatkan kasus lain yang cukup baru dan hangat diperbincangkan maka lakukan observasi terlebih dahulu apakah penelitian akan membahas hal sensitive atau tidak, sehingga peneliti akan mudah mendapatkan ketersediaan informan dengan cakupan lebih luas lagi.

DAFTAR PUSAKA

- Ainiyah, G.Z., Yubiharto and Wardani, A.T. (2022) 'IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI AKUNTANSI (SIA) DALAM MENINGKATKAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) ASTAGINA', *Tambara E-Journal*, 13(2), pp. 44–62.
- Arista, W. (2017). Akuntabilitas dan Transparansi Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Sumberejo dan Desa Kandung di Kecamatan Wonongan Kabupaten Pasuruan). Skripsi. Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Badrudin, R. (2017). *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Baridwan, Z. (2015). Sistem informasi akuntansi. Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Davis, J. H., Schoorman, F. D., & Donaldson, R. (1997). Toward a Stewardship Theory of Management. *Academy of Management Review*, 22(1), 20-47.
- Dewi, K. C., Kurniawan, P. S., & Yasa, I. N. P. (2018). Analisis Efektifitas Sistem Informasi Akuntansi Dalam Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Studi Pada Badan Usaha Milik Desa Mandala Giri Amertha Desa Tajun). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 9(3), 26–37.
- Dewi, Y. A., Nasfi., & Yuliza. M. (2021). Sistem Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi Akuntansi, Pertanggung Jawaban Pengelolaan Dana Desa.
- Fahmi, I. (2017). *Analisis Laporan Keuangan* (6ed.). Bandung: Alfabeta.
- Harryanto, Kartini, Haliah. 2014. Budget Process of Local Government in Indonesia. *Review of Integrative Business & Economics Research* Vol 3 (2), 483-501.
- Indraswari, N. E., & Rahayu, Y. (2021). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa , Partisipasi Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(4), 1–15.
- Indrawati, S. M. (2017). *Buku Pintar Dana Desa*, Jakarta: Kementerian Keuangan. Republik Indonesia.
- Kriyantono, R. (2018). Kearifan Lokal dan Strategi Komunikasi Public Relations di BUMN dan Perusahaan Swasta. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 15(2), 171–188. <https://doi.org/10.24002/jik.v15i2.1480>

- Lantowa, F.D. and Yusuf, F.M. (2023) *PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI (SIA) DALAM MENINGKATKAN KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI KABUPATEN GORONTALO*, 7(2).
- Lubis, N., Kamilah and Yanti, N. (2023) ‘Implementasi Sistem Informasi Akuntansi (Sia) Dalam Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) (Studi Kasus Badan Usaha Milik Desa, Lumban Dolok, Kec. Siabu, Kab. Mandailing Natal)’, *SEIKO : Journal of Management & Business*, 6(2), pp. 367–376.
- Makmur. (2015). Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan. Bandung: PT Refika Aditama, 6 – 8.
- Mardiasmo. (2016). Efisiensi dan Efektivitas. Jakarta: Andy.
- Moleong, L. J. (2017). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi. (2008). *Auditing*. Edisi Keenam. Jakarta : Salemba Empat.
- Murhadi, W. R. (2019). Analisis Laporan Keuangan : Proyeksi dan Valuasi Saham. Jakarta : Salemba Empat
- Nugroho, A.T. *et al.* (2022) ‘PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA’, *Edunomika - Vol. 06, No. 02, 2022*
- Pramelani, P., & Lestari, A. (2019). Program Employee Gathering “Satukan Hati Selaraskan Tujuan” Dalam Menjalini Hubungan Baik Karyawan. *Jurnal Komunikasi*, 10(1), 42–47. <https://doi.org/10.31294/jkom.v10i1.5096>
- Purwanti, Umi. (2021). TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA MELILIAN KECAMATAN GELUMBANG KABUPATEN MUARA ENIM. : *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)*
- Rahardjo & Adisasmita. (2011). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Cetak Pertama, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Ronald. H. (2012). Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Sistem Informasi Akuntansi. *Jurnal Berkala Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*. Vol. 1 (3), Mei. Jurusan Akuntansi Fakultas Bisnis Unika Widya Mandala Surabaya.
- Sagala, M.K. and Siregar, S. (2023) ‘Pengelolaan Keuangan, Sistem Informasi Akuntansi Dan Transparansi Kinerja Keuangan Pada bumdes’, *E-Jurnal Akuntansi*, 33(6), p. 1613. doi:10.24843/eja.2023.v33.i06.p015.
- Sahusilawane. W. (2014). Pengaruh Partisipasi Pemakai dan Dukungan Atasan terhadap Kinerja Sistem Informasi Akuntansi pada Bank Umum

Pemerintah. Jurnal Organisasi dan Manajemen. Vol. 10 (1). Maret. Fakultas Terbuka. Zaki Baridwan. 2004. *Intermediate Accounting*. Edisi Kedelapan, BPFE. Yogyakarta

Sarah, S., Taufik, T., & Safitri, D. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Masyarakat Dan Spi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Indragiri Hulu. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(4), 330-342.

Sugiyono (2016) metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: CV Alfabeta, 205 – 287.

Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: CV Alfabeta.

Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: Alfabeta.

Sujarweni, V. W. (2015). Akuntansi Sektor Publik : Teori, Konsep, dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Baru.

Wahyuni, S., Indrawati, N., & Al Azhar, A. (2018). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Sistem Informasi Akuntansi, Dan Kompetensi Aparat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa: Studi Empiris Desa-Desa Di Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal ekonomi*.

Wardani, D. K., & Andriyani, I. (2017). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Klaten. *Jurnal Akuntansi*, 5(2), 88-98.

Wijaya, D.R. (2022) 'PENGARUH PENGELOLAAN KEUANGAN DAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP TRANSPARANSI KINERJA KEUANGAN BUMDES', *JURNAL ILMIAH AKUNTANSI DAN KEUANGAN*, 4(3).

Yanti and Nurlaelasari, E. (2023) 'Sistem Informasi Akuntansi Berbasis WEB sebagai Transparansi dan Sinkronisasi dalam Pengelolaan BUMDES Kabupaten Karawang', *Akuisisi Journal Akuntansi*, 18, pp. 74–85.

Yanti, P.M.L.K. and Musmini, L.S. (2020) 'Menerapkan Sistem Informasi Akuntansi Dalam Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Pamsimas Pada Bumdes Giri Artha', *Jurnal Akuntansi Profesi*, 11(1).

Yulianti, Widia, Kamaliah, & Rasuli. (2018). Pengaruh Kompetensi, Teknologi Informasi, Sistem Akuntansi, Internal Control terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Keuangan Desa (Studi Empiris di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.